



BERITA RESMI STATISTIK

No. 50/05/Th. XXIX, 5 Mei 2026



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025

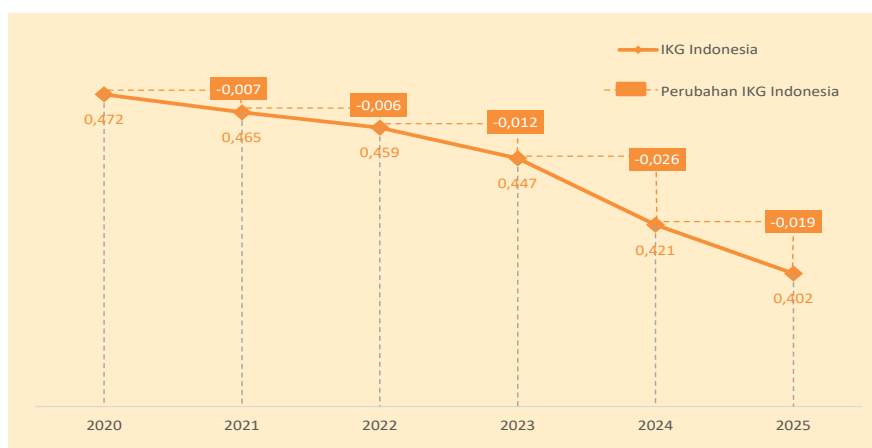
- Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tercatat sebesar 0,402, menunjukkan perbaikan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki untuk lebih sehat, berdaya, dan produktif.



-
- Nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia 2025 tercatat sebesar 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
 - Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada indikator pembentuk IKG masih terjadi. Namun, secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.
 - Ketimpangan gender mengalami perbaikan di sebagian besar provinsi di Indonesia.

1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia Tahun 2025

Pada 2025, nilai Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tercatat sebesar 0,402 atau membaik 0,019 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini memperlihatkan perkembangan yang konsisten dan berkelanjutan dalam kesetaraan gender sejak 2020.



Gambar 1 Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2020–2025

2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia Tahun 2025 Menurut Dimensi Pembentuknya

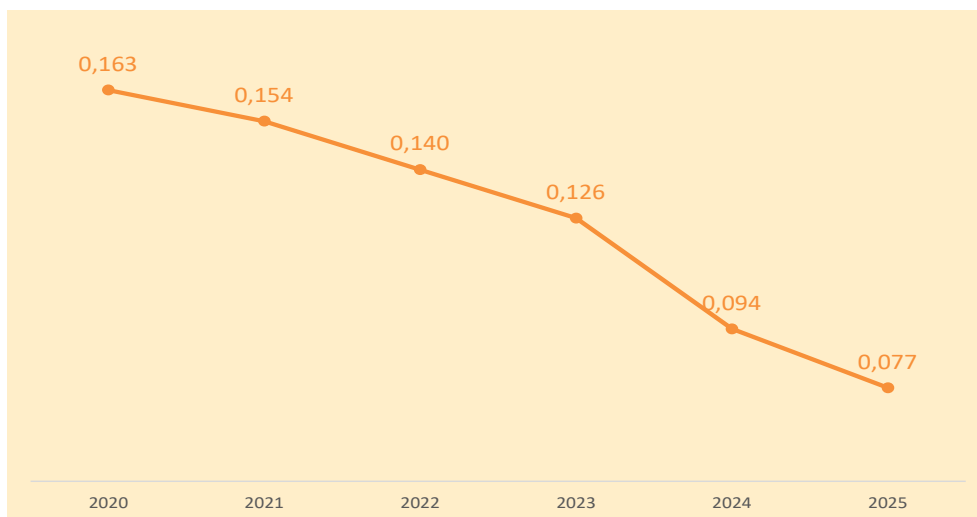
Selama lima tahun terakhir, nilai IKG Indonesia menunjukkan perbaikan konsisten pada tiga dimensi pembentuknya, terutama dimensi kesehatan reproduksi dan pasar tenaga kerja. Perbaikan pada dimensi kesehatan reproduksi menunjukkan bahwa risiko kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia telah berhasil ditekan. Perbaikan pada dimensi pemberdayaan khususnya pada indikator pendidikan menunjukkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki menyempit. Sementara itu, perbaikan pada dimensi pasar tenaga kerja menunjukkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi semakin membaik. Perkembangan indikator pembentuk IKG selama 2020–2025 dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1 Perkembangan Indikator Pembentuk Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia, 2020–2025

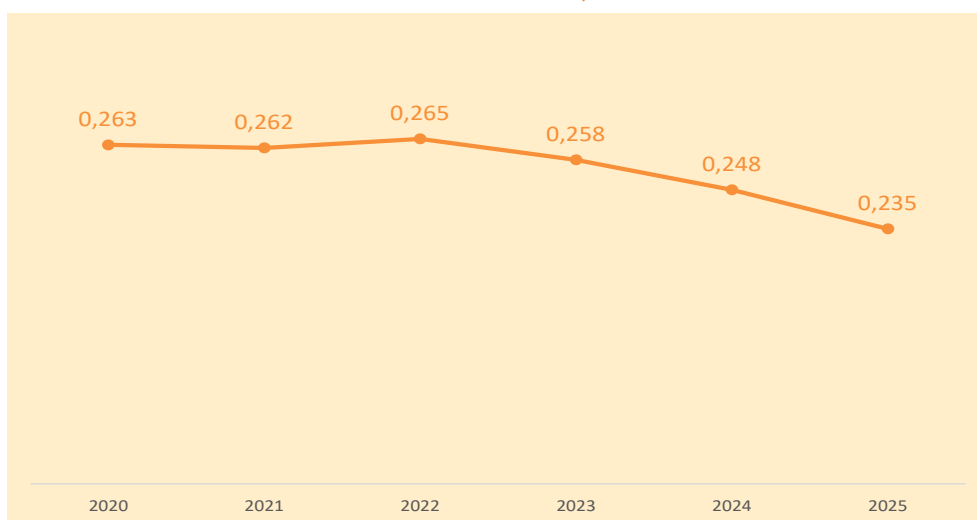
Dimensi/Indikator	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kesehatan Reproduksi							
MTF	Perempuan	0,163	0,154	0,140	0,126	0,094	0,077
MHPK20	Perempuan	0,263	0,262	0,265	0,258	0,248	0,235
Pemberdayaan							
Keterwakilan di Legislatif (%)	Laki-Laki	78,91	78,11	78,26	77,86	77,54	77,72
	Perempuan	21,09	21,89	21,74	22,14	22,46	22,28
Pendidikan SMA ke Atas (%)	Laki-Laki	41,63	41,30	42,06	42,62	43,78	44,23
	Perempuan	34,63	34,87	36,95	37,60	37,64	38,35
Pasar Tenaga Kerja							
TPAK (%)	Laki-Laki	82,41	82,27	83,87	84,26	84,66	84,40
	Perempuan	53,13	53,34	53,41	54,52	56,42	56,63

2.1 Dimensi Kesehatan Reproduksi

Dimensi kesehatan reproduksi diukur dengan dua indikator, yaitu: proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang dalam dua tahun terakhir melahirkan anak lahir hidup terakhir tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun (MHPK20). Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut mengalami perbaikan selama 2020 hingga 2025. Pada 2025, nilai MTF tercatat sebesar 0,077 atau membaik 0,017 poin dibandingkan 2024. Nilai MHPK20 juga mengalami perbaikan menjadi 0,235 pada 2025 atau membaik 0,013 poin dibandingkan 2024.



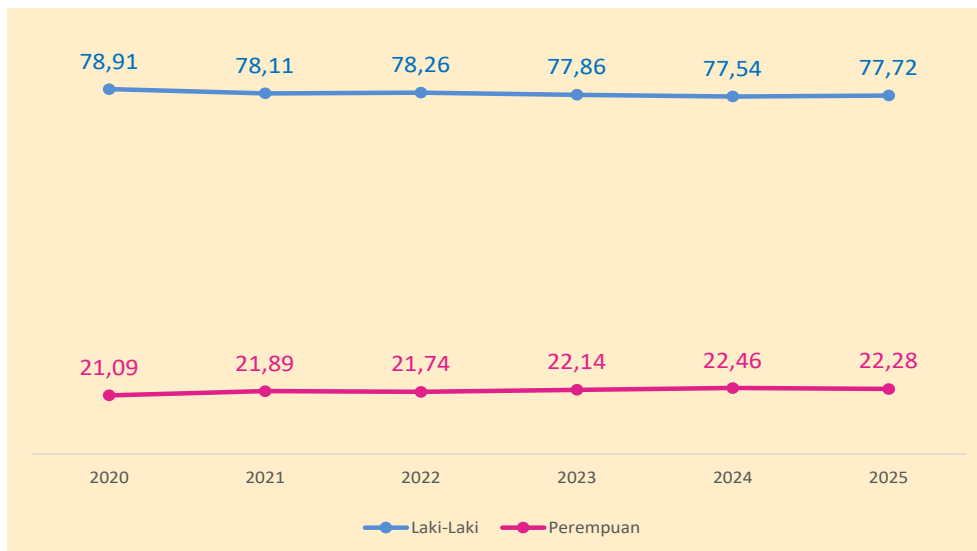
Gambar 2 Indikator MTF, 2020–2025



Gambar 3 Indikator MHPK20, 2020–2025

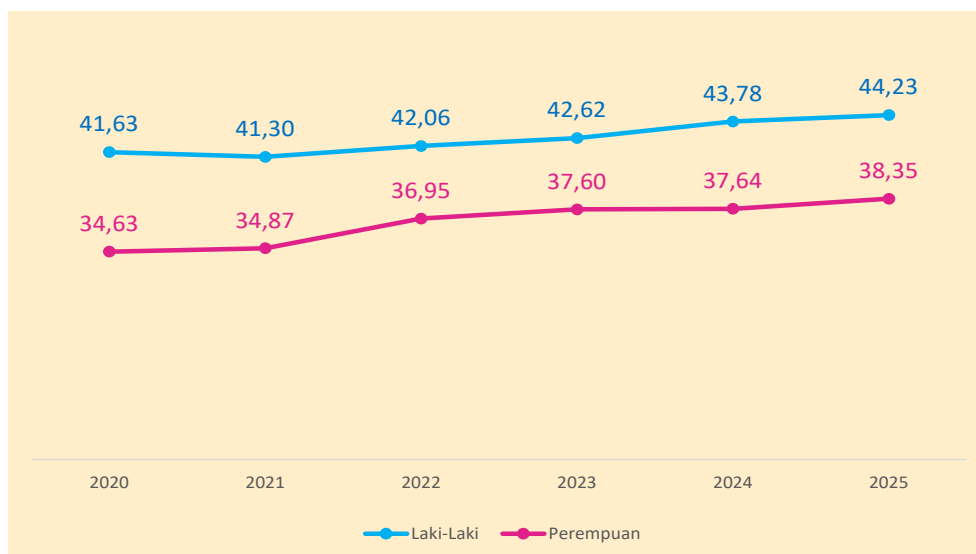
2.2 Dimensi Pemberdayaan

Dimensi pemberdayaan diukur dengan dua indikator, yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA. Pada 2025, anggota legislatif perempuan tercatat 22,28 persen atau turun 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan anggota legislatif laki-laki tercatat 77,72 persen atau meningkat 0,18 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2020–2025, kesenjangan gender (*gender gap*) di lembaga legislatif menyempit dari 57,82 persen poin menjadi 55,44 persen poin.



Gambar 4 Persentase Anggota Legislatif Perempuan dan Laki-Laki, 2020–2025

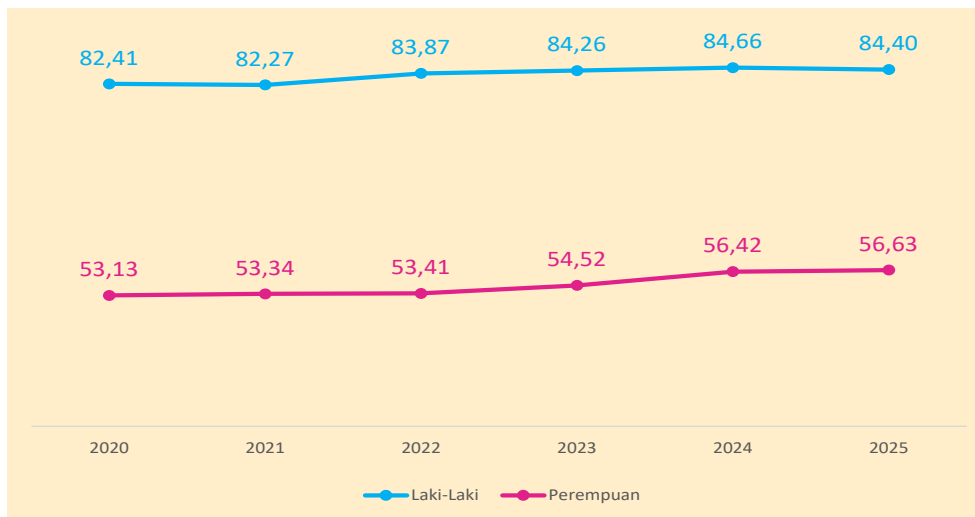
Indikator dimensi pemberdayaan berikutnya berupa persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA. Indikator ini meningkat pada 2025 baik untuk perempuan maupun laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA mencapai 38,35 persen dan laki-laki 44,23 persen. Dibandingkan tahun 2024, baik perempuan maupun laki-laki menunjukkan peningkatan, masing-masing meningkat 0,71 persen poin dan 0,45 persen poin.



Gambar 5 Persentase Perempuan dan Laki-Laki dengan Pendidikan Minimal SMA, 2020–2025

2.3 Dimensi Pasar Tenaga Kerja

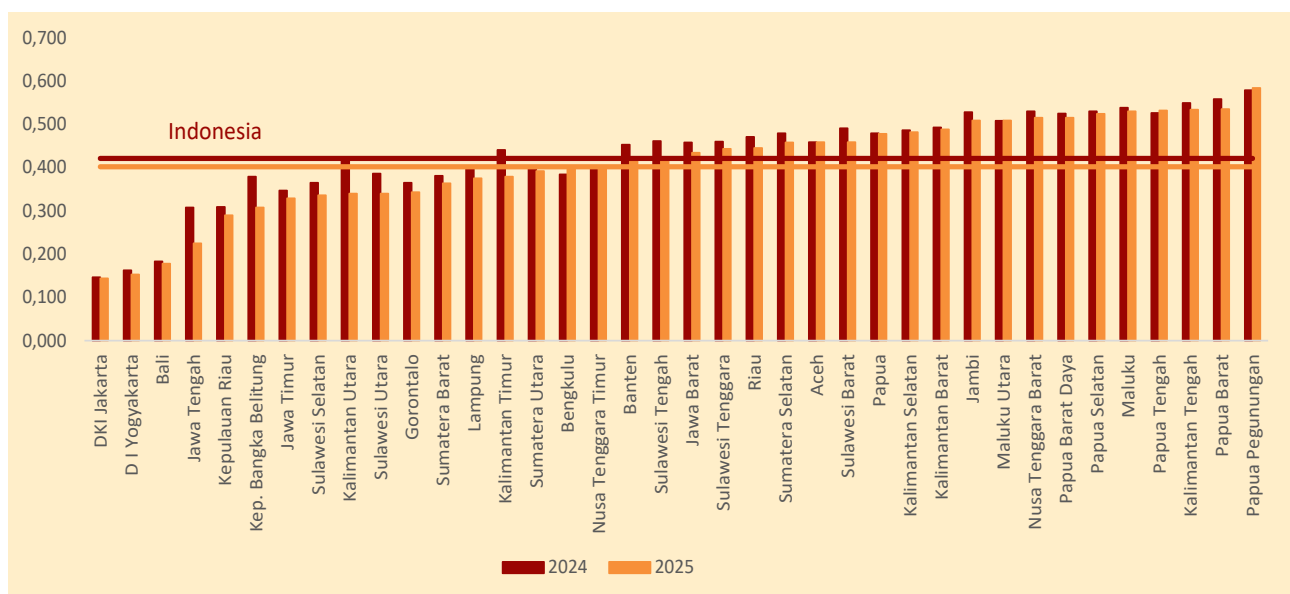
Dimensi pasar tenaga kerja diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK perempuan mengalami peningkatan, sementara TPAK laki-laki mengalami penurunan pada 2025. TPAK perempuan naik 0,21 persen poin menjadi 56,63 persen pada 2025. Sedangkan TPAK laki-laki tercatat 84,40 persen pada 2025, turun 0,26 persen poin dari tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan peningkatan partisipasi kerja perempuan yang lebih cepat dibandingkan laki-laki.



Gambar 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan dan Laki-Laki (persen), 2020–2025

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2025 Menurut Provinsi

Pada 2025, kesetaraan gender menunjukkan kemajuan nyata di hampir seluruh provinsi di Indonesia yang ditunjukkan dari selisih nilai IKG tahun sebelumnya. Dari 32 provinsi yang mencatat perbaikan IKG, tiga daerah menonjol dengan perbaikan paling signifikan: Jawa Tengah (membaik 0,083 poin), Kalimantan Utara (membaik 0,078 poin), dan Kepulauan Bangka Belitung (membaik 0,071 poin). Kondisi ini disebabkan oleh perbaikan hampir semua indikator, meski Kalimantan Utara masih menghadapi tantangan pada indikator MHPK20. Hal ini menegaskan bahwa ketiga provinsi tersebut mampu bergerak lebih cepat dalam menekan ketimpangan gender.



Gambar 7 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi, 2024–2025

Di sisi lain, empat provinsi mengalami ketimpangan gender yang semakin melebar, yaitu Bengkulu (melebar 0,012 poin), Papua Tengah (melebar 0,006 poin), Papua Pegunungan (melebar 0,005 poin), dan Maluku Utara (melebar 0,001 poin). Pola ketimpangan gender yang semakin melebar ini dipengaruhi oleh kombinasi indikator yang berbeda. Provinsi Bengkulu dipengaruhi oleh indikator MTF. Papua Tengah dipengaruhi oleh kenaikan indikator MTF dan penurunan indikator keterwakilan perempuan di legislatif. Papua Pegunungan menghadapi kondisi yang lebih kompleks, yakni peningkatan indikator MTF, indikator MHPK20, serta *gender gap* yang semakin melebar pada indikator pendidikan minimal SMA dan indikator TPAK. Sementara itu, Maluku Utara, dipengaruhi oleh penurunan indikator keterwakilan perempuan di legislatif dan peningkatan *gender gap* indikator TPAK.

Pada 2025, sebagian besar provinsi mencatat nilai IKG di atas nilai IKG nasional. Sebanyak 21 provinsi mencatat IKG lebih tinggi daripada nilai nasional, menandakan ketimpangan gender yang relatif lebih lebar. Namun, tidak sedikit pula daerah yang menunjukkan kemajuan kesetaraan gender. Terdapat 17 provinsi yang berhasil menyamai atau bahkan melampaui nilai IKG nasional.

Catatan Teknis

Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia merujuk pada metode *Gender Inequality Index* (GII) dari UNDP, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan ketersediaan data nasional. Salah satu penyesuaian penting adalah penggunaan indikator proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak hidup di luar fasilitas kesehatan (MTF) sebagai proksi *Maternal Mortality Rate* (MMR) atau Angka Kematian Ibu (AKI). Hal ini dilakukan karena data AKI tidak tersedia secara rutin setiap tahun, sementara MTF memiliki korelasi kuat dengan AKI dan tersedia secara konsisten hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, persalinan di fasilitas kesehatan terbukti menekan risiko kematian ibu, sehingga indikator MTF dianggap mampu mencerminkan capaian AKI secara lebih representatif.

Untuk indikator *Adolescent Birth Rate* (ABR) yang digunakan UNDP dalam penghitungan GII, Indonesia menggunakan pendekatan berbeda dengan memanfaatkan indikator MHPK20, yaitu proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak pertama sebelum berusia 20 tahun. Pemilihan MHPK20 sebagai proksi didasarkan pada korelasi yang kuat dengan ABR serta ketersediaannya secara rutin di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan demikian, indikator ini dianggap mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai tren kelahiran remaja sekaligus menjaga konsistensi penghitungan IKG setiap tahun.

Sementara itu, 3 (tiga) indikator lainnya sama dengan yang digunakan oleh UNDP dalam menyusun GII, yaitu persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas, persentase anggota legislatif, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dibangun dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang diukur melalui indikator MTF dan MHPK20. Kedua, dimensi pemberdayaan yang tercermin dari persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA serta keterwakilan perempuan di legislatif. Ketiga, dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili oleh indikator TPAK. Nilai IKG berkisar antara 0 hingga 1; semakin kecil nilainya, semakin setara kondisi gender di suatu wilayah, sedangkan semakin besar nilainya menunjukkan ketimpangan gender yang lebih tinggi.

Langkah-langkah penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menghitung indeks perempuan dan indeks laki-laki

$$G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$$

$$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$$

2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik

$$HARM(G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$$

3. Menghitung indeks dimensi

$$IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$$

$$IP = \frac{\left(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L} \right)}{2}$$

$$IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$$

4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik

$$G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$$

5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender

$$\text{Indeks Kesetaraan Gender} = \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

$$IKG = 1 - \frac{HARM(G_p, G_L)}{G_{p,L}}$$

Catatan

G_p	= Indeks perempuan
G_L	= Indeks laki-laki
MTF	= Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan
MHPK20	= Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
PR_p	= Persentase perempuan di legislatif
PR_L	= Persentase laki-laki di legislatif
SE_p	= Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA
SE_L	= Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan minimal SMA
$TPAK_p$	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja perempuan
$TPAK_L$	= Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki
$HARM(G_p, G_L)$	= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik
IKR	= Indeks dimensi kesehatan reproduksi
IP	= Indeks dimensi pemberdayaan
IPK	= Indeks dimensi pasar tenaga kerja
$G_{p,L}$	= Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
IKG	= Indeks Ketimpangan Gender

Tabel 2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Menurut Provinsi, 2020–2025

Provinsi	2020	2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,514	0,503	0,504	0,489	0,459	0,459
Sumatera Utara	0,468	0,445	0,442	0,425	0,399	0,392
Sumatera Barat	0,503	0,455	0,430	0,425	0,381	0,364
Riau	0,503	0,477	0,473	0,458	0,471	0,445
Jambi	0,558	0,554	0,540	0,528	0,528	0,509
Sumatera Selatan	0,521	0,520	0,517	0,496	0,479	0,458
Bengkulu	0,523	0,520	0,478	0,469	0,384	0,396
Lampung	0,474	0,458	0,456	0,437	0,399	0,375
Kep. Bangka Belitung	0,559	0,527	0,497	0,490	0,379	0,308
Kepulauan Riau	0,416	0,387	0,395	0,348	0,309	0,290
DKI Jakarta	0,210	0,194	0,320	0,256	0,147	0,144
Jawa Barat	0,489	0,493	0,490	0,482	0,458	0,434
Jawa Tengah	0,370	0,377	0,371	0,336	0,308	0,225
D.I. Yogyakarta	0,149	0,250	0,240	0,142	0,163	0,153
Jawa Timur	0,449	0,460	0,440	0,423	0,347	0,329
Banten	0,484	0,475	0,478	0,464	0,453	0,418
Bali	0,305	0,265	0,321	0,239	0,183	0,178
Nusa Tenggara Barat	0,665	0,653	0,648	0,650	0,530	0,515
Nusa Tenggara Timur	0,471	0,437	0,436	0,428	0,402	0,402
Kalimantan Barat	0,558	0,547	0,522	0,519	0,493	0,488
Kalimantan Tengah	0,547	0,537	0,526	0,541	0,549	0,534
Kalimantan Selatan	0,528	0,525	0,514	0,507	0,486	0,482
Kalimantan Timur	0,467	0,436	0,443	0,414	0,441	0,379
Kalimantan Utara	0,468	0,472	0,444	0,452	0,418	0,340
Sulawesi Utara	0,431	0,439	0,444	0,422	0,386	0,340
Sulawesi Tengah	0,520	0,497	0,477	0,469	0,461	0,423
Sulawesi Selatan	0,427	0,410	0,390	0,366	0,365	0,336
Sulawesi Tenggara	0,559	0,554	0,490	0,491	0,460	0,443
Gorontalo	0,456	0,443	0,411	0,391	0,365	0,343
Sulawesi Barat	0,543	0,543	0,510	0,494	0,491	0,459
Maluku	0,534	0,521	0,527	0,509	0,538	0,530
Maluku Utara	0,547	0,541	0,534	0,519	0,508	0,509
Papua Barat	0,527	0,527	0,537	0,537	0,558	0,535
Papua Barat Daya ¹	–	–	–	–	0,525	0,515
Papua	0,532	0,535	0,515	0,518	0,479	0,478
Papua Selatan ¹	–	–	–	–	0,530	0,524
Papua Tengah ¹	–	–	–	–	0,526	0,532
Papua Pegunungan ¹	–	–	–	–	0,579	0,584
Indonesia	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421	0,402

Catatan:

¹Nilai IKG tahun 2020–2022 pada Provinsi Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan belum tersedia karena provinsi tersebut masih tergabung dengan provinsi induk. Nilai IKG tahun 2023 pada keempat provinsi tersebut belum tersedia karena anggota legislatif belum dilantik.

INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG) 2025

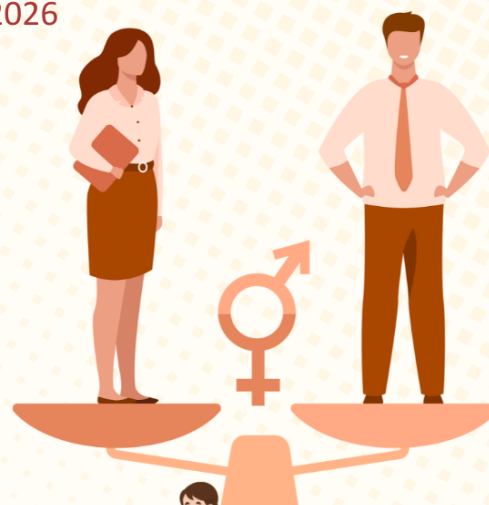


Berita Resmi Statistik No. 50/05/Th. XXIX, 5 Mei 2026

IKG 2025 | **0,402**

Indeks Ketimpangan Gender

- IKG Indonesia tahun 2025 sebesar 0,402, membaik 0,019 poin dibandingkan 2024.
- Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki pada indikator pembentuk IKG masih terjadi. Namun, secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya.



Dimensi Kesehatan Reproduksi

0,235

Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup pertama kali pada usia kurang dari 20 tahun



0,077

Proporsi perempuan pernah kawin usia 15–49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir tidak di fasilitas kesehatan



Dimensi Pemberdayaan

Persentase Anggota Legislatif



Perempuan
22,28



Laki-Laki
77,72

Persentase Penduduk dengan Pendidikan Minimal SMA



Perempuan
38,35



Laki-Laki
44,23



Dimensi Pasar Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

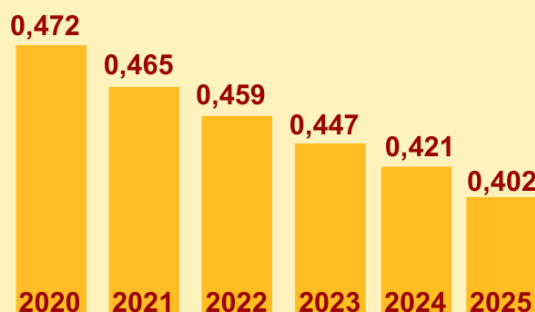


Perempuan
56,63%



Laki-Laki
84,40%

IKG
2020–2025



Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin rendah menunjukkan perbaikan dalam kesetaraan gender.



BADAN PUSAT STATISTIK
<https://www.bps.go.id>

Gambar 8 Infografis Indeks Ketimpangan Gender (IKG), 2025



Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi:



Etjih Tasriah SE, M.P.P.
Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit
☎ (021) 3810291-4, Ext. 7300
✉ tasriah@bps.go.id

Untuk layanan perpustakaan, penjualan data mikro, publikasi elektronik, publikasi cetakan, dan peta digital wilayah kerja statistik sesuai peraturan yang berlaku maupun konsultasi statistik dapat menghubungi Pelayanan Statistik Terpadu (PST) di pst.bps.go.id

Konten Berita Resmi Statistik dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Badan Pusat Statistik. Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: (021) 3857046
Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

